

Pengaruh Islamic Values Dan *Corporate governance* Terhadap *Corporate Governance Disclosure* Pada Bank Syariah di Indonesia

Koriatul Hasanah^{1*}, Lia Uzliawati², Tri Lestari³

^{1,2,3}S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹koriatulhasanah12@mail.com, ²uzliawati@untirta.ac.id, ³tri.lestari@untirta.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 5 Juli 2023

Disetujui : 28 Juli 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Islamic values and corporate governance on corporate governance disclosure. The independent variables in this research are Islamic values and corporate governance, which are proxied by corporate governance mechanisms, managerial ownership, and institutional ownership. The dependent variable in this research is corporate governance disclosure. This research's population consists of all Annual Reports of Islamic Commercial Banks that are registered with the Financial Services Authority (OJK). The sampling method used was purposive sampling, and 13 companies were selected from a total sample of 52 research data points. The analysis technique used is multiple linear regression with SPSS v25 software. The results of this research indicate that Islamic values have no effect on corporate governance disclosure, corporate governance proxied by corporate governance mechanisms has an effect on corporate governance disclosures, managerial ownership has no effect on corporate governance disclosures, and institutional ownership has no effect on corporate governance disclosures.

Keywords: *Corporate governance Disclosure, Corporate governance Mechanism, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Islamic Values.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic values* dan *corporate governance* terhadap *corporate governance disclosure*. Penerapan *corporate governance* yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh para *stakeholder*, berdasarkan survei (Mckinsey & Company, 2002) sebagian besar investor bahkan menganggap bahwa *corporate governance* sama pentingnya dengan indikator keuangan suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai baik buruknya suatu perusahaan. Diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi perusahaan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka *corporate governance disclosure* merupakan solusi untuk menjawabnya. kebutuhan setiap pemangku kepentingan akan informasi tata kelola perusahaan, (Nirbitha & Adiwibawa, 2015).

Mengingat urgensi *corporate governance disclosure* yang sangat besar menyebabkan masalah yang muncul ketika investor ingin melakukan pengendalian yang berbeda dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perusahaan (Becht et al., 2005). Isu mengenai *corporate governance disclosure* semakin marak seiring dengan perkembangan perusahaan di Indonesia yang telah mencapai tahap persaingan internasional yang bersifat global, dimana semua perusahaan bersaing sangat ketat dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. Menanggapi kebutuhan tersebut,

pemerintah kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG) pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Urusan No: KEP-49/M.EKON/11/2004. KNKG merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan secara komprehensif implementasi *good governance* di Indonesia dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu *governance* di sektor publik dan swasta (Warsono, 2009). Terbentuknya komite ini menghasilkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2006, namun pedoman tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

Corporate governance disclosure kemudian diatur dalam berbagai peraturan untuk dapat memperkuat peraturan yang ada dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan, sehingga ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa peraturan yang telah diterbitkan antara lain Keputusan Bapepam No 431/BL/2012 Peraturan Bapepam -LK No. XK6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Governance* bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditasi Rakyat.

Faktanya, meskipun peraturan tentang *corporate governance disclosure* telah dikeluarkan, beberapa hasil penilaian tata kelola perusahaan di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan upaya peningkatan tata kelola perusahaan belum dilakukan secara komprehensif (Ardhanareswari, 2017). *Corporate governance disclosure* memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi pada perusahaan khususnya sektor perbankan karena semua jenis bank memiliki karakteristik yang sama yaitu menghimpun uang masyarakat (Darmadi, 2013). Hal ini menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan di bidang perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya, oleh karena itu penerapan *good corporate governance* harus ditingkatkan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah.

Praktik tata kelola perusahaan dapat dikatakan terintegrasi dengan keberadaan bank syariah sejak awal berdirinya, sedangkan tata kelola perusahaan sebagai kebijakan formal terus diupayakan dan ditingkatkan oleh bank syariah. Namun faktanya penilaian pengungkapan tata kelola perusahaan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) sepanjang tahun 2017 dan 2018 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana bank syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Tabungan Pensiun Syariah Nasional dan Bank Panin Dubai Syariah yang terpilih. menjadi obyek penilaian. oleh IICD tidak mendapatkan predikat sebagai perusahaan terpercaya yang ditunjukkan dengan skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang rendah (Laporan Tahunan IICD, 2018). Ketika banyak perusahaan, khususnya di sektor perbankan syariah, tidak mengungkapkan tata kelola perusahaan secara optimal, menimbulkan pertanyaan besar di benak pemangku kepentingan, apa yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola perusahaan.

STUDI LITERATUR

Teori agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik (*principal*), namun disisi lain manajer juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Adanya benturan kepentingan/konflik kepentingan sehingga besar kemungkinan agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Tjandra (2013) menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki oleh manajer dan pemegang saham (asimetri informasi). Hal ini terjadi karena manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham. (Eisenhardt, 1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi tentang sifat manusia, yaitu sebagai berikut: (1)

manusia umumnya mementingkan diri sendiri (2) manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa depan (rasionalitas terikat) (3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Ketiga sifat dasar tersebut menyebabkan dapat dipercayanya informasi yang dihasilkan oleh manusia terhadap manusia lainnya dan informasi yang disampaikan biasanya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal dengan asimetri informasi. Manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan pada sifat oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan sendiri (Wibisono, 2004).

Diperlukan upaya untuk mengatasi asimetri informasi akibat perilaku oportunistik manajer, salah satunya melalui transparansi. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan tata kelola perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan dapat mengurangi informasi asimetris (Gonedes, 1980; Greenstein dan Sami, 1994; Welker, 1995; Lang dan Lundholm, 1996 dalam Khomsiyah & Susanti, 2003). Pengawasan juga diperlukan untuk dapat mengatasi asimetri informasi, beberapa unsur yang menjadi fokus pengawasan dalam penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai Islam dan tata kelola perusahaan dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasional bisnisnya akan cenderung memiliki tingkat pemantauan dan pengawasan yang lebih tinggi (Al-Basam & Ntim, 2017). Perusahaan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga memiliki tingkat pengawasan dan keterbukaan informasi yang baik (Nirbitha & Adiwibawa, 2015).

Islamic Values

Nilai-nilai Islam/*Islamic values* dalam penelitian ini adalah operasi bisnis dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan 'Syariah' meliputi: (1) memberikan laporan independen kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen terhadap prinsip/nilai bisnis Islam; dan (2) mengaudit rekening perusahaan untuk memverifikasi keakuratan pembayaran pajak agama Islam (zakat) dan penggunaan pinjaman syariah (Lewis, 2005 dalam Albassam & Ntim, 2017). Selain itu, agar efektif dalam memantau dan memberi nasihat kepada manajer, perusahaan harus menggambarkan akuntabilitas, independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan pengungkapan (Lewis, 2005; Grais dan Pellegrini, 2006 dalam Albassam & Ntim, 2017). Dalam konteks Islam secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan fakta keuangan dan informasi keuangan yang benar, adil, tepat waktu dan transparan tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya (Abu-Tapanjeh, 2009). Perusahaan yang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasional bisnisnya dapat dikatakan lebih tunduk pada pemantauan dan pengawasan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan *Islamic values*. Oleh karena itu, dan dari perspektif teori keagenan, sebuah perusahaan yang secara sukarela merangkul dan memasukkan *Islamic values* ke dalam operasi bisnisnya menunjukkan niat entitas untuk berkomitmen pada standar tata kelola yang baik (Albassam & Ntim, 2017).

Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Governance Disclosure

Mekanisme *corporate governance* menggambarkan proses kebiasaan, kebijakan, hukum dan mengarahkan organisasi dan perusahaan dalam bertindak untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan. Mekanisme *corporate governance* bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan mengelola hubungan antara pemangku kepentingan termasuk dewan direksi dan pemegang saham. Perusahaan memiliki masalah keagenan yang besar jika perusahaan belum menerapkan tata kelola perusahaan secara optimal. Permasalahan yang muncul dalam hubungan keagenan dapat dikurangi dengan menggunakan kontrak, namun tidak semua aspek dapat digunakan dalam kontrak, sehingga diperlukan mekanisme *corporate governance* (Darmadi, 2013).

Menurut Walsh & Seward (1990) mekanisme *corporate governance* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal terdiri dari: dewan komisaris termasuk komite-komite di bawahnya, direksi, manajemen dan pemegang saham. Sedangkan mekanisme eksternal terdiri dari pasar modal, penyandang dana, konsumen, dan regulator. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017, pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan di industri perbankan harus selalu berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Untuk dapat memastikan terlaksananya 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan dalam SE BI No. 9/12/DPNP, Bank wajib melakukan *self assessment* secara berkala. Dalam pelaporan Self Assessment GCG terdapat beberapa tahapan sampai dengan hasil akhir penilaian komposit dan bagaimana perlakuan hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan oleh Bank Indonesia, nilai komposit ini adalah digunakan sebagai indikator variabel mekanisme *corporate governance*.

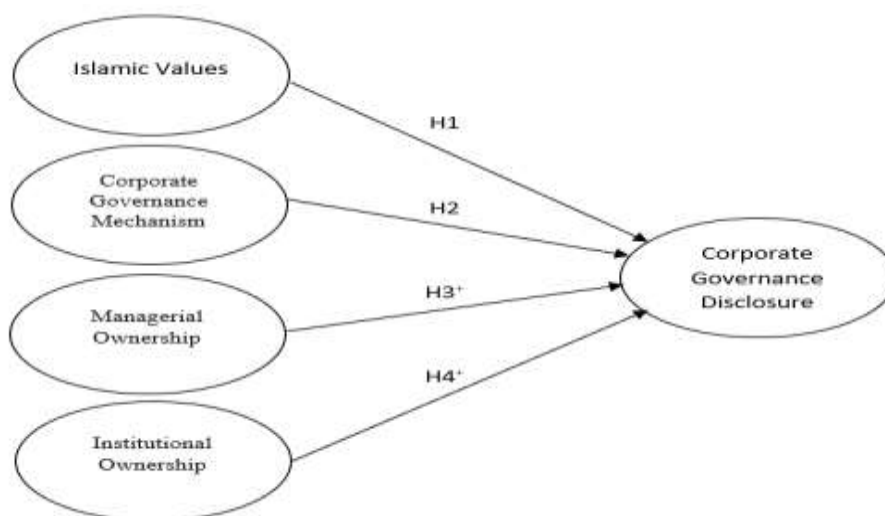
Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial kepemilikan sejumlah saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat mengatasi adanya peluang perbedaan kepentingan antara pemegang saham non manajemen dengan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham, termasuk dalam hal pengungkapan informasi.

Kepemilikan Institusional atas Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Mawardi & Nurhalis (2018) Kepemilikan institusional adalah suatu kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, dalam maupun luar negeri. Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Dari seluruh uraian di atas, maka model penelitian tentang pengaruh nilai-nilai Islam, mekanisme *corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate governance* adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual
Sumber gambar : diolah oleh peneliti (2023)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah *Islamic values*, *mekanisme corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *corporate governance disclosure* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Tahunan perusahaan periode 2017-2020. Data sekunder adalah data yang telah disediakan oleh pihak lain dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut dapat berupa catatan, arsip atau bukti, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data dalam

penelitian ini berupa laporan tahunan yang diperoleh dari website resmi perusahaan dan *website* <http://www.idx.co.id/>.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020. Data penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian yaitu statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan data analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 25.

Variabel Penelitian

Variabel dependen *corporate governance disclosure* perusahaan diukur dengan menggunakan Corporate Governance Disclosure Index (IPCG) (Surifah, 2011), rumusnya sebagai berikut:

$$IPCG = \frac{\sum \text{IPCG Score}}{\text{IPCG Maximal Score}}$$

Variabel independen, Islamic values diukur dengan menggunakan Islamic Values Development Index (IVDI) (Albassam & Ntim, 2017), rumusnya sebagai berikut:

$$IVDI = \frac{\sum \text{IVDI Score}}{\text{IVDI Maximal Score}}$$

Variabel independen, mekanisme *corporate governance* diukur dengan menggunakan *self assesment GCG* yang merupakan nilai mutlak yang telah ditentukan yang disebut nilai komposit menurut Bank Indonesia pada SE BI No. 9/12/DPNP.

Variabel independen, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer (Alvionita & Taqwa, 2015), rumusnya sebagai berikut:

$$IVDI = \frac{\sum \text{Number of Managerial Shares}}{\sum \text{Number of Shares Issued}}$$

Variabel independen kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi (Alvionita & Taqwa, 2015), rumusnya sebagai berikut:

$$IVDI = \frac{\sum \text{Number of Institutional Shares}}{\sum \text{Number of Shares Issued}}$$

HASIL

Deskripsi Variabel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017-2020. Dengan prosedur pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria. Sampel akhir dari penelitian ini adalah 13 perusahaan dalam 4 tahun pengamatan sehingga jumlah keseluruhan sampel adalah 52 sampel data pengamatan.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018). Variabel yang digunakan meliputi *Islamic Values* (IV), Mekanisme *Corporate Governance* (MCG), Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Institusional (KI) dan *Corporate Governance Disclosure* (CGD). Berikut adalah tabel hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Berarti	St. Deviasi
IV	52	.70000	1,00000	.8942308	.10368403
MCG	52	1,00000	3,00000	2.0961538	.63430108
KM	52	.00000	.02190	.0008308	.00413569
KI	52	.50300	1,00000	.9533231	.09591735
CGD	52	.68750	.83929	.7633929	.03421667

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023)

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Monte Carlo Sig. (2-ekor)	Toleransi	VIF	Sig	Durbin Watson
IV	0,200	.826	1.211	0,123	1.782
MCG		.812	1.232	0,869	
KM		.995	1.005	0,217	
KI		.971	1.030	0,415	
N = 52					

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023)

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai Sig Monte Carlo sebesar 0,200 yang lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$), yang berarti data residual pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan variabel *Islamic values*, mekanisme *corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan variance inflation factor (VIF) < 10 , hal ini menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel Nilai Islam (IV), Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (MCG), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian sebelumnya menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Dari hasil analisis tersebut terlihat Durbin Watson yang dihasilkan dari uji autokorelasi sebesar 1,782. lebih besar dari nilai (du) 1,7223 dan lebih kecil dari (4-du). $(4-1,7223) = 2,2777$, atau $1,7223$ (du) $< 1,782$ (dw) $< 2,2777$ (4-du). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R persegi	R Square yang disesuaikan	St. Kesalahan Perkiraan
1	0,430a	0,185	0,116	0,03217468

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023)

Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,116 atau sebesar 11,6% yang berarti bahwa variabel independen *Islamic values* (IV), Mekanisme *Corporate Governnace* (MCG), Kepemilikan Manajerial (KM)) dan Kepemilikan

Institusional (KI) mempengaruhi *corporate governance disclosure* (CGD) sebesar 11,6%, sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	2.670	0,044
Sig. 0,05		

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25(2023)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai Fhitung sebesar 2,670 dan Ftabel sebesar 2,57 dengan nilai signifikansi 0,044. Fhitung 2,670 lebih besar dari Ftabel 2,57 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Islamic values* (IV), *mekanisme corporate governance* (MCG), kepemilikan manajerial (KM) dan kepemilikan institusional (KI) secara simultan berpengaruh terhadap variabel *independen corporate governance disclosure* (CGD).

Hasil Uji T

Tabel 5. Hasil Uji T

Model	Hipotesa	B	T	Sig.	Catatan	Kesimpulan
(Konstan)		0,734	10.005	0,000		
CGD IV →	H1	0,045	0,940	0,352	Tidak Signifikan	Tidak diterima
MCG →CGD	H2	-0,016	-2.040	0,047	Penting	Diterima
KM →CGD	H3+	1.520	1.392	0,171	Penting	Tidak diterima
KI →CGD	H4+	0,023	0,474	0,638	Penting	Tidak diterima

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25(2023)

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi nilai Islam 0,352 > 0,05 dan nilai t hitung 0,940 < ttabel 2,01063, kepemilikan manajerial 0,171 > 0,05 dan nilai t hitung 1,392 < t-tabel 2,01063, kepemilikan institusional 0,638 > 0,05 dan nilai t-hitung 0,474 < t-tabel 2,01063, pada tingkat kepercayaan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Islamic values* (IV) Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap *Corporate Governance Disclosure* (CGD).

Namun berdasarkan hasil uji T pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi mekanisme *corporate governance* 0,047 < 0,05 dan nilai t hitung 2,040 > t tabel 2,01063 pada tingkat kepercayaan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme *corporate governance* (MCG) berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure* (CGD).

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 6 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
CGD : 0,734 + 0,045 + 0,016 + 0,520 + 0,023 + ε

PEMBAHASAN

Pengaruh *Islamic Values* terhadap *Corporate Governance Disclosure*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya *Islamic values* tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan perspektif teori keagenan. Menurut teori keagenan, perusahaan yang menerapkan *Islamic values* dalam operasional bisnisnya harus memiliki tingkat pemantauan dan pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan *Islamic values*. Perspektif teori agensi juga mempertimbangkan perusahaan yang secara sukarela merangkul dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasi bisnis yang menunjukkan niat entitas untuk berkomitmen pada standar tata kelola yang baik (Albassam & Ntim, 2017). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *Islamic values* berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Albassam & Ntim, 2017) dan Salim Darmadi (2013). Penelitian ini mendukung penelitian Bader (2013) dan Ousama & Fatima (2010) yang menunjukkan bahwa *Islamic Values* tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*.

Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Governance Disclosure*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik nilai mekanisme *corporate governance* dengan indikator nilai komposit *self assessment GCG* pada perusahaan maka semakin tinggi pula nilai pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan manajemen dalam hal ini mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi perusahaan sebagai akibat dari asimetri informasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Albassam et al. (2015) dan Albassam & Ntim (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi *corporate governance disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Governance Disclosure*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Hasil penelitian tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap *corporate governance disclosure* dapat disebabkan karena pada umumnya bank syariah di Indonesia dimiliki oleh bank induknya yang merupakan bank konvensional, juga karena masih sedikitnya perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga kepemilikan individu tidak dapat dengan mudah memiliki saham di perusahaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widjayanti & Wahidawati (2015). Penelitian ini mendukung penelitian Alvionita & Taqwa (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Governance Disclosure*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Hasil penelitian yang tidak berpengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate governance disclosure* dapat disebabkan karena pada umumnya bank syariah di Indonesia dimiliki oleh bank induknya yang merupakan bank konvensional, juga karena masih sedikitnya institusi yang memiliki saham di perusahaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh dan Albassam et al. (2015) dan Alvionita & Taqwa (2015). Penelitian ini mendukung penelitian Al-Janadi et al. (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic values* dan *corporate governance* terhadap *corporate governance disclosure*. Berdasarkan hasil uji statistik dan analisis pembahasan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa *Islamic values*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Islamic values* pada Bank Umum Syariah dan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional dan investor manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*. Namun mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap *corporate governance disclosure*.

Dalam penelitian ini penulis menemukan keterbatasan yaitu hanya menggunakan sampel periode 2017-2020 dimana beberapa Bank Umum Syariah belum melakukan *merger*. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian komparatif sebelum dan sesudah penggabungan. Pada penelitian ini variabel nilai-nilai Islam menggunakan indikator IVDI yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan sampel perusahaan di Timur Tengah sehingga kurang relevan dengan kondisi Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator terbaru yang dapat mencerminkan penerapan *Islamic values* pada bank syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Janadi, Y., Abdul Rahman, R., & Alazzani, A. (2016). Does government ownership affect corporate governance and corporate disclosure? Evidence from Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9), 871-890.
- Al-Bassam, W. M., Ntim, C. G., Opong, K. K., & Downs, Y. (2015). Corporate boards and ownership structure as antecedents of corporate governance disclosure in Saudi Arabian publicly listed corporations. *Business & Society*, 57(2), 335-377.
- Albassam, W. M., & Ntim, C. G. (2017). The effect of Islamic values on voluntary corporate governance disclosure: The case of Saudi-listed firms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Alvionita, I., & Taqwa, S. (2015). Pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. In Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Ardhanawati, R. (2017). Pelaksanaan dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah. *Law and Justice*, 2(1), 66-78.
- Bader Afw. (2013). An investigation of voluntary disclosure by Kuwaiti Shariah-compliant companies. *Journal of Economic and Administrative Sciences* 29:1, 21-41.
- Becht, M., Jenkinson, T., & Mayer, C. (2005). Corporate governance: an assessment. *Oxford Review of Economic Policy*, 21(2), 155-163.
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory research on Indonesian Islamic banks. *Humanomics*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of management review*, 14(1), 57-74.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Khomsiyah, K., & Susanti, S. (2003). Pengungkapan, Asimetri Informasi, dan Cost of Capital. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 5(3), 237-257.
- Mawardi, M., & Nurhalis, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Cash Holding Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 9(1).
- McKinsey & Company, (2002). Global Investor Opinion Survey 2002 : Key Findings, July, <http://www.McKinsey.com/Governance>.
- Nirbhita, N. A., & Adiwibawa, A. S. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Governance Disclosure. *Diponegoro Journal of Accounting*, 238-246.
- Ousama, dan Fatima., 2010. "Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory research", working paper, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Surifah, (2011). Arranging The Index of Corporate Governnace. *Jurnal Dinamika Manajemen* Vol. 2, No. 1, 2011, pp: 1-16

- Tjandra, E. (2013). Telaah Teoritis Struktur Kepemilikan dalam Teori Kegenan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 112-119.
- Walsh, J. P., & Seward. (1990). On The Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms. *Academy of Management Review*, Vol. 15: pp. 421-458.
- Warsono, S. (2009). Corporate governance concept and model: preserving true organization welfare (Vol. 1). Center for Good Corporate Governance, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Wibisono, H. (2004). Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Seputar SEO. *Magister Sains Akuntansi UNDP*.
- Widjayanti, S. A., & Wahidawati, W. (2015). Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(7).